



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA KERJA

BADAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2020



PANGKALPINANG

TAHUN 2019

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) yang menjelaskan bahwa Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini merupakan dokumen Rencana Kerja 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun sebagai penjabaran Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Tujuan Penyusunan Renja PD ini adalah acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan tahunan Perangkat Daerah serta menyediakan indikator – indikator yang dijadikan tolak ukur dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Tujuan disusunnya Renja Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah:

- (1) menetapkan indikator sasaran yang hendak dicapai dalam rumusan teknokratik Rencana Strategis Perangkat Daerah 2017-2022;
- (2) merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang (2021);
- (3) memberi arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Adapun Fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah sebagai pedoman Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan Secara Singkat Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud Dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020

Bab II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan,

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Program/Kegiatan badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Bab V : PENUTUP

Berisi uraian penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja pada Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Pada Tahun 2018 Badan Keuangan Daerah telah melaksanakan 1 (satu) Program Rutin dan 6 (enam) Program Prioritas Pembangunan, 7 (tujuh) Kegiatan Rutin dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan prioritas pembangunan untuk mencapai 6 (enam) sasaran strategis. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 92.33 %, Indikator Kinerja Program sebesar 113.35 % dan Indikator Kinerja Kegiatan sebesar 98.01%. Sedangkan realisasi anggaran mencapai 86.96 % yaitu sebesar Rp. 22.839.787.079.00 (dua puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dari pagu sebesar Rp. Rp. 26.263.271.798,00 (Dua puluh enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari capaian rata-rata sebesar 92.33 %, Indikator Kinerja Utama “prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD” mencapai realisasi tertinggi yaitu dari target sebesar 84.85% terealisasi sebesar 92.74%, sehingga capaian IKU sebesar 109.30%. Sedangkan Indikator Kinerja Utama “prosentase kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD” menempati posisi paling rendah, dari target sebesar 15.15 % realisasi IKU hanya mencapai 7.26 %, atau terealisasi sebesar 47.92%.

B. Capaian Indikator Kinerja Program

Dari capaian rata-rata sebesar 113.35 %, Indikator Kinerja Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah “Prosentase Pertumbuhan pendapatan pajak daerah” mencapai realisasi tertinggi yaitu dari target sebesar 6.10% terealisasi sebesar 23.11%, sehingga capaian Indikator Kinerja Program sebesar 378.94%. Sedangkan Indikator Kinerja Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah “Prosentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan LLPADS” menempati posisi paling rendah, dari target sebesar 5.03 % realisasi Indikator Kinerja Program hanya mencapai 0.00 %, atau terealisasi sebesar 0.00%.

C. Capaian indikator Kinerja Kegiatan

Dari capaian rata-rata sebesar 113.35 %, Indikator Kinerja Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah “Prosentase Pertumbuhan pendapatan pajak daerah” mencapai realisasi tertinggi yaitu dari target sebesar 6.10% terealisasi sebesar 23.11%, sehingga capaian Indikator Kinerja Program sebesar 378.94%. Sedangkan Indikator Kinerja Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah “Prosentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan LLPADS” menempati posisi paling rendah, dari target sebesar 5.03 % realisasi Indikator Kinerja Program hanya mencapai 0.00 %, atau terealisasi sebesar 0.00%

Realisasi Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan dapat dilihat pada Tabel T-C.29 berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Badan Keuangan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	IndikatorKinerja Program(outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2022(Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018						Target Program dan Kegiatan Renja Perangka Daerah Tahun 2019		Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2019		
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Tingkat Realisasi					
1						2	3	4		5		6			7		8=7/6		9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
						FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN																
						PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH	Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	87.678.087.665,00	-	-	100,00	%	14.242.602.958,00	72,46	13.108.038.365,00	72,46%	92,03%	100,00	19.827.607.257,00	172,46	172,46%
						Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	60,00	58.215.368.307,00	-	-	12,00	bulan	8.912.650.000,00	12	8.393.500.396,00	100,00%	94,18%	12,00	10.708.026.807	24,00	40,00%
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100	27.303.737.508,00	-	-	100,00	%	4.649.207.958,00	69,03	4.097.151.780,00	69,03%	88,13%	100,00	8.868.232.500	169,03	169,03%
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya setelah mengikuti Bimtek/Diklat	147,00	988.556.350,00	-	-	20,00	orang	147.720.000,00	17	119.352.489,00	85,00%	80,80%	28,00	236.347.950	45,00	30,61%
						Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur	Jumlah pakaian dinas untuk ASN dan THL di Lingkungan BAKUDA	874	1.036.828.000,00	-	-	424,00	stel	474.328.000,00	412	444.279.700,00	97,17%	93,67%	-	-	412,00	47,14%

					Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA	Jumlah bulan layanan Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA	60,00	133.597.500,00	-	-	12,00	bulan	58.697.000,00	12	53.754.000,00	100,00%	91,58%	12,00	15.000.000	24,00	40,00%
						Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (AA=90-100, A=80-90, BB=70-80, B=60-70, CC=50-60, C=40-50)	86	84.316.484,00	-	-	69,50		59.227.984,00	76,6	52.395.400,00	110,22%	88,46%	74,00	5.025.800,00	150,60	175,12%
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	15,00	38.005.692,00	-	-	3,00		29.395.242,00	3	28.036.400,00	100,00%	95,38%	3,00	1.725.000	6,00	40,00%
					Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	35,00	46.310.792,00	-	-	7,00		29.832.742,00	7	24.359.000,00	100,00%	81,65%	7,00	3.300.800	14,00	40,00%
					Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase Pertumbuhan pajak daerah	6,81%	6.575.961.125,00	-	-	6,10%	%	1.192.187.500,00	23,11%	708.082.797,00	378,94%	59,39%	4,78%	1.667.882.250,00	0,28	409,54%
					Intensifikasi Sumber- sumber Pajak Daerah	realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah melalui PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan, PPBKB dan Pajak Rokok	896.135.515.577,00	3.407.751.450,00	-	-	619.190.464.260,00	Rp	568.799.000,00	#####	269.054.969,00	117,07%	47,30%	703.658.305.500,00	1.181.744.000	1.428.565.150.959,80	159,41%
					Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	60	1.964.350.850,00	-	-	12,00	12	563.585.000,00	12	399.746.618,00	100,00%	70,93%	12,00	280.525.000	24,00	40,00%
					Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	8	88.882.075,00	-	-	-	kali	-	-	-	0,00%	0,00%	2,00	17.800.000	2,00	25,00%
					Penyusunan Pedoman tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang disusun	3	59.803.500,00	-	-	3,00	peraturan	59.803.500,00	3	39.281.210,00	100,00%	65,68%	-	-	3,00	100,00%

					Sosialisasi Pajak Daerah	jumlah peserta Sosialisasi Perda Pajak Daerah ; Jumlat spot sosialisasi pada media massa cetak dan elektronik ; jumlah hari pameran yang diikuti	1260 ; 120 ; 56	937.821.000,00	-	-	-	orang;kali;hari	-	-	-	0,00%	0,00%	280;30;7	187.813.250	280;30;7	0,22;0,25;0,13
					Razia PKB dan BBN-KB Roda 2 dan roda 4	jumlah pelaksanaan Razia PKB dan BBN-KB Roda 2 dan roda 4 di wilayah kab/kota	6	104.175.000,00	-	-	-	kali	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%
					Penyusunan regulasi/kebijakan bidang tata kelola pajak daerah	Jumlah Peraturan tentang tata kelola pajak daerah tersusun	12	13.177.250,00	-	-	-	peraturan	-	-	-	0,00%	0,00%	3,00	-	3,00	25,00%
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	83	23.935.173.014,00	-	-	78,00	nilai	3.501.414.014,00	82,52	3.154.472.231,00	105,80%	90,09%	79,50	4.681.473.750,00	162,0247684	195,21%
					Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kota pangkalpinang	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kota pangkalpinang	60	3.976.097.000,00	-	-	12,00	bulan	567.936.000,00	12	544.921.815,00	100,00%	95,95%	12	770.774.000	24	40,00%
					Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka	60	3.920.576.500,00	-	-	12,00	bulan	532.959.750,00	12	497.060.943,00	100,00%	93,26%	12	766.489.750	24	40,00%
					Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung	60	4.373.944.500,00	-	-	12,00	bulan	610.686.000,00	12	579.397.066,00	100,00%	94,88%	12	844.830.000	24	40,00%
					Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	60	2.511.681.264,00	-	-	12,00	bulan	390.753.264,00	12	369.603.221,00	100,00%	94,59%	12	502.321.000	24	40,00%
					Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat	60	2.882.816.000,00	-	-	12,00	bulan	530.916.500,00	12	421.809.555,00	100,00%	79,45%	12	550.490.000	24	40,00%

						Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	60	3.006.944.250,00	-	-	12,00	bulan	410.812.500,00	12	346.181.104,00	100,00%	84,27%	12	601.425.000	24	40,00%
						Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur	Jumlah bulan layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTB Wilayah Kabupaten Belitung Timur	60	3.263.113.500,00	-	-	12,00	bulan	457.350.000,00	12	395.498.527,00	100,00%	86,48%	12	645.144.000	24	40,00%
							Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap terhadap Jasa Lainnya Badan Keuangan Daerah	85	1.601.108.750,00	-	-	80,00	nilai	462.071.000,00	87,04	324.123.136,00	108,79%	70,15%	81,00	228.110.000,00	168,0353261	197,69%
						Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	60	275.713.250,00	-	-	12,00	bulan	85.965.000,00	12	64.573.336,00	100,00%	75,12%	12	38.000.000	24	40,00%
						Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	Jumlah Bulan Layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	60	1.325.395.500,00	-	-	12,00	bulan	376.106.000,00	12	259.549.800,00	100,00%	69,01%	12	190.110.000	24	40,00%
						Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	Prosentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan LLPADS	5,03%	1.214.751.100	-	-	5,03%		539.812.100	(0)	476.881.634	#####	88,34%	5,03%	124.399.250	-0,1656442	-329,31%
						Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	jumlah perangkat daerah dan pihak terkait penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain	220,00	279.886.500	-	-	40,00	Instansi	182.167.000	42,00	170.603.505	105,00%	93,65%	45	19.570.000	87	39,55%
						Rakor Dana Bagi Hasil Pajak bukan Pajak	jumlah penyelenggaraan Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	6,00	223.711.950	-	-	1,00	Kali	86.400.100	1,00	70.908.729	100,00%	82,07%	1	27.499.000	2	33,33%
						Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah peserta bimbingan teknis	78	67.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0	-	0	0,00%

					Penyusunan Pedoman Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah peraturan gubernur tentang tata cara pengelolaan retribusi daerah	2,00	48.943.000	-	-	2,00	Pergub	48.943.000	2,00	39.102.250	100,00%	79,89%	0	-	2	100,00%
					Tim Pengawasan Peningkatan Pendapatan Daerah	Realisasi pendapatan daerah Prov. Kep. Bangka Belitung	10	384.964.550	-	-	2,00	bulan	222.302.000	2,00	196.267.150	100,00%	88,29%	2	32.576.250	4	40,00%
					Rapat Kerja retribusi daerah dan pendapatan lain-lain	Jumlah penyelenggaraan Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	44,00	178.406.350	-	-	-		-		-	0,00%	0,00%	10	35.729.000	10	22,73%
					Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang Sah	Jumlah Peraturan Tentang Regulasi/Kebijakan Bidang tata Kelola retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah	5,00	31.338.750	-	-					-	0,00%	0,00%	1	9.025.000	1	20,00%
					Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi	prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	100,00%	1.018.090.850	-	-	100,00%	%	307.701.000	100,00%	225.982.110	100,00%	73,44%	100,00%	298.132.000	2	200,00%
					Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	Jumlah peserta Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	600,00	454.511.000	-	-	120,00	orang	129.074.000,00	118	94.911.900,00	98,33%	73,53%	120,00	143.536.000	238	39,67%
					Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Jumlah dokumen register SP2D, Buku Kas Umum B.IX BUD, Laporan posisi kas harian dan laporan posisi kas bulanan	20,00	166.624.600	-	-	4,00	dokumen	94.720.000,00	4	68.902.370,00	100,00%	72,74%	4	14.400.000,00	8	40,00%
					Sosialisasi Penata usahaan Keuangan	Jumlah Peserta sosialisasi	60,00	97.084.250	-	-			-	0	0	0,00%	0,00%	100,00	140.196.000	100	166,67%
					Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung	Jumlah bulan layanan Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung	400,00	299.871.000	-	-	12,00	bulan	83.907.000,00	12	62.167.840,00	100,00%	74,09%	12	-	24	6,00%
					Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan	persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP	100,00%	2.978.980.192	-	-	100,00%	%	1.105.197.642	100,00%	865.196.565	100,00%	78,28%	100,00%	411.443.000	2	200,00%

						Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	35,00	205.993.900	-	-	7,00	Keputusan	108.500.000,00	7,00	77.436.000,00	100,00%	71,37%	7,00	11.125.000,00	14	40,00%
						Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	5,00	458.942.250	-	-	1,00	laporan	98.920.000,00	1,00	41.517.100,00	100,00%	41,97%	1,00	69.100.000	2	40,00%
						Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5,00	893.108.200	-	-	1,00	rancangan peraturan	286.076.000,00	1,00	264.434.417,00	100,00%	92,44%	1,00	106.568.000	2	40,00%
						Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Nota Kesepakatan antara Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyusunan Laporan Keuangan	5,00	280.653.442	-	-	1,00	kali	112.626.642,00	1,00	51.844.000,00	100,00%	46,03%	1,00	33.650.000	2	40,00%
						Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	Jumlah bulan layanan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	60,00	850.032.400	-	-	12,00	bulan	499.075.000,00	12,00	429.965.048,00	100,00%	86,15%	12,00	191.000.000	24	40,00%
						Penyusunan regulasi/Kebijakan bidang akutansi dan pelaporan	Jumlah Peraturan tentang regulasi / kebijakan bidang akuntansi dan pelaporan	4,00	290.250.000,00	-	-	-	peraturan	-	0	0	0,00%	0,00%	-	-	0	0,00%
						Peningkatan Tata Kelola Asset Daerah	persentase laporan BMD PD yang sesuai dengan Peraturan	100,00%	3.363.170.500	-	-	100,00%	%	1.170.976.800	100%	819.171.075	100,00%	69,96%	100%	451.214.000	2	200,00%
						Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10,00	215.600.500	-	-	2,00	laporan	119.180.000,00	2	92.979.300,00	100,00%	78,02%	2	19.310.000	4	40,00%
						Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5,00	261.456.050	-	-	1,00	keputusan	139.118.800,00	1	131.839.200,00	100,00%	94,77%	1	24.500.000	2	40,00%

					Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang, Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang, Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100,00	244.662.700,00	-	-	9,00	orang	48.998.000,00	16	26.883.000,00	177,78%	54,87%	0	-	16	16,00%
					Penyusunan pedoman tentang pengelolaan barang milik daerah	Jumlah pergub tentang pengelolaan barang milik daerah	1,00	131.840.000,00	-	-	1,00	peraturan	131.840.000,00	1,00	65.945.400,00	100,00%	50,02%	-	-	1	100,00%
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	Jumlah bulan layanan sistem Aplikasi SIMDA ter-update	60,00	392.894.250	-	-	12,00	bulan	244.592.000,00	12,00	161.275.600,00	100,00%	65,94%	12,00	29.700.000	24	40,00%
					Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah	Jumlah Sertifikat lahan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100,00	384.103.500	-	-	20,00	sertifikat	138.380.000,00	-	57.255.500,00	0,00%	41,38%	20,00	49.210.000	20	20,00%
					Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	10,00	147.963.600	-	-	2,00	laporan	136.960.000,00	2,00	126.058.875,00	100,00%	92,04%	2,00	252.204.000	4	40,00%
					Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	300,00	239.602.500	-	-	-	orang	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0	0,00%
					Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	600,00	520.122.000	-	-	200,00	orang	162.898.000,00	177,00	131.734.200,00	88,50%	80,87%	105,00	71.540.000	282	47,00%
					Forum Komunikasi Manajemen Asset Daerah	Jumlah Dokumen data permasalahan dan pemecahan masalah asset di tingkat Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,00	225.712.500	-	-	-	dokumen	-			0,00%	0,00%	0	-	0	0,00%

					Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)Pengadaan dan Pemeliharaan	5,00	72.726.500,00	-	-	1,00	keputusan	49.010.000,00	1,00	25.200.000,00	100,00%	51,42%	1,00	4.750.000	2	40,00%
					Penyusunan Regulasi / kebijakan bidang tata kelola aset daerah	Jumlah Peraturan Tentang regulasi / kebijakan bidang tata kelola aset daerah	3,00	526.486.400,00	-	-	-	peraturan	-	-	0,00	0,00%	0,00%	-	-	0	0,00%
						persentase nilai asset yang dimanfaatkan terhadap seluruh nilai asset daerah	0,28%	1.471.102.500	-	-	0,27%	%	270.350.000	0,27%	243.305.193	100,00%	90,00%	0,28%	657.980.000	0,005501427	193,55%
					Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Asset yang sebelumnya bernilai Rp.0,00/Rp 1,00 dan Asset yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga	5	789.057.500	-	-	1,00	dokumen	156.150.000,00	1	130.197.027,00	100,00%	83,38%	1,00	285.000.000,00	2	40,00%
					Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Keputusan Gubernur tentang penetapan penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5,00	682.045.000	-	-	1,00	Keputusan	114.200.000,00	1	113.108.166,00	100,00%	99,04%	1,00	372.980.000	2	40,00%
					Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi	100,00%	7.241.918.250	-	-	100,00%	%	2.784.419.400	90,00%	2.416.345.083	90,00%	86,78%	100,00%	982.775.000	1,9	190,00%
					Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	20,00	2.975.193.250	-	-	4,00	rancangan peraturan	1.626.982.000,00	4	1.521.500.454,00	100,00%	93,52%	4,00	303.000.000	8	40,00%
					Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	1.000	951.935.750	-	-	200,00	orang	165.480.000,00	109	152.432.652,00	54,50%	92,12%	200,00	172.500.000	309	30,90%
					Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Jumlah peserta Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	340	314.837.500	-	-	100,00	orang	153.587.500,00	108	138.612.785,00	108,00%	90,25%	-	-	108	31,76%
					Penyusunan Analisa Standar Belanja	Jumlah keputusan Gubernur tentang Analisa Standar Belanja	2,00	265.769.000	-	-	1,00	keputusan	180.769.000,00	1	165.218.600,00	100,00%	91,40%	-	-	1	50,00%

					Penyusunan pedoman tentang penyusunan RKA-PD/PPKD	Jumlah Rapergub tentang pedoman penyusunan RKA-PD/PPKD	1,00	143.615.500	-	-	1,00	peraturan	143.615.500,00	1	134.199.795,00	100,00%	93,44%	-	-	1	100,00%
					Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	20,00	1.952.401.750	-	-	4,00	dokumen	513.985.400,00	4	304.380.797,00	100,00%	59,22%	4,00	236.400.000	8	40,00%
					Penyusunan Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1,00	176.925.000	-	-	-	rancangan peraturan	-	0	0	0,00%	0,00%	1,00	176.925.000	1	100,00%
					Penyusunan regulasi/kebijakan bidang anggaran	jumlah peraturan tentang regulasi/kebijakan bidang anggaran	5,00	461.240.500	-	-	-	rancangan peraturan	-	0	0	0,00%	0,00%	1,00	93.950.000	1	20,00%
						Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten/Kota	100,00%	984.086.700,00	-	-	100,00%	%	627.311.400,00	93,93%	445.793.490,00	93,93%	71,06%	100,00%	71.450.000,00	1,9393	193,93%
					Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	70	686.525.400,00	-	-	14,00	Keputusan	445.596.400,00	14	320.610.800,00	100,00%	71,95%	14,00	48.250.000	28	40,00%
					Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40	297.561.300,00	-	-	8,00	kali	181.715.000,00	8	125.182.690,00	100,00%	68,89%	8,00	23.200.000	16,00	40,00%
								138.146.747.130,00	-	-			26.263.271.798,00		22.839.787.079,00		86,96%		29.407.492.307,00		

2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pembantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam mengambil Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mebukukan pendapatan dan belanja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah **merealisasikan 107.82% Target Pendapatan Pajak Daerah, menurun sebesar 1.02 % dari tahun 2017 yang mebukukan realisasi target sebesar 108.80 %**. Namun jika dilihat dari nilai pendapatan terjadi kenaikan sebesar **Rp. 158.098.962.826,44 (Seratus lima puluh delapan milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam koma empat puluh empat)**. Pada tahun 2018 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merealisasikan pendapatan pajak daerah sebesar **Rp. 787.235.420.038,83 (Tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu tiga puluh delapan koma delapan puluh tiga rupiah)**, sedangkan pada tahun 2017 **pendapatan pajak daerah terealisasi sebesar yaitu sebesar Rp. 629.136.457.212,39 (Enam ratus dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu koma tiga puluh sembilan rupiah)** dari target sebesar **Rp. 578.237.062.209,57 (Lima ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh dua ribu dua ratus sembilan koma lima puluh tujuh rupiah)**.

Pendapatan Pajak Daerah ini menyumbang kontribusi sebesar 92.47% pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 851.377.438.761.35 (Delapan ratus lima puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu koma tiga puluh lima rupiah) dan **30.69 % pada realisasi total penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp. 2.565.163.435.299.35 (dua trilyun lima ratus enam puluh lima milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh lima rupiah)**.

Sedangkan realisasi penerimaan pendapatan Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah masing masing-masing memberikan **sebesar 0.89 %, 0.60 % dan 6.40% pada Pendapatan Asli Daerah (PAD)**.

Tabel berikut ini menggambarkan realisasi pendapatan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 :

URAIAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI	% TERHADAP PAD
PENDAPATAN ASLI DAERAH	789.629.819.565,87	851.377.438.761,35	107,82%	
Pendapatan Pajak Daerah	669.996.399.762,00	787.235.420.038,83	117,50%	92,47%
Hasil Retribusi Daerah	16.438.195.604,87	7.604.027.047,00	46,26%	0,89%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.500.000.000,00	5.114.092.291,88	60,17%	0,60%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	94.695.224.199,00	51.423.899.383,64	54,30%	6,04%

TABEL II.1 KOMPOSISI REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2018

Ratio Kemampuan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkat sebesar 3.79 % pada tahun 2018, pada tahun 2018 ratio kemampuan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 49.85 % sedangkan capaian pada tahun 2017 adalah sebesar 46.06 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Diagram berikut menyajikan data Ratio kemampuan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2010-2018 :

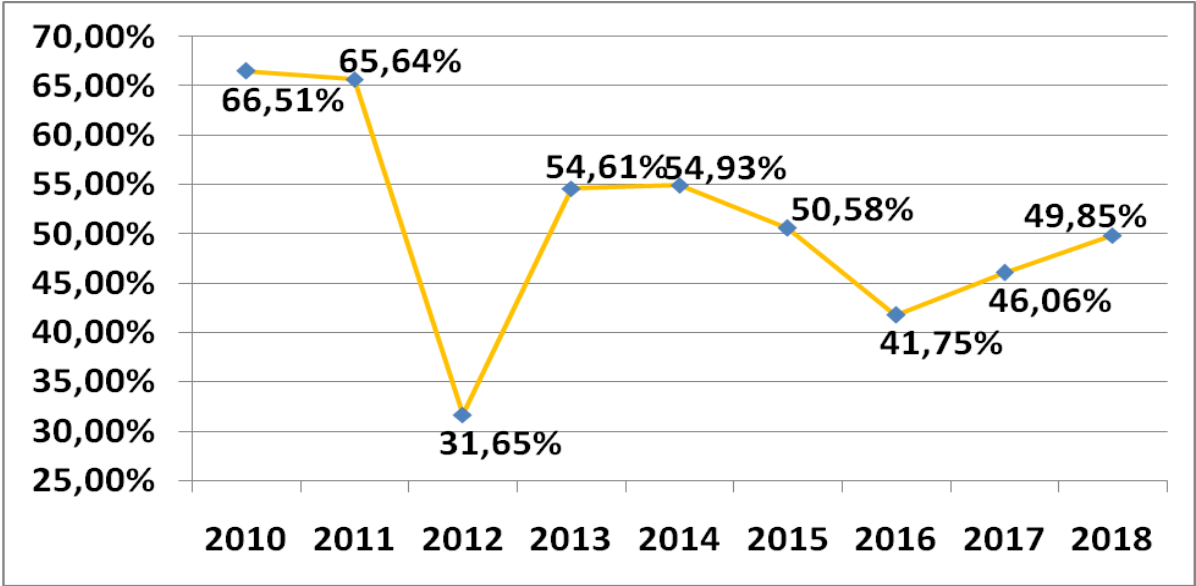


DIAGRAM II.1 RATIO KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2010-2018

Sedangkan ketergantungan keuangan daerah menurun pada tahun 2018 yaitu sebesar 66.81% dibandingkan tahun 2018 sebesar 68.37 % . Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin tinggi tingkat kemampuan fiskal daerah dengan berkurangnya ketergantungan bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

Tabel Berikut menyajikan realisasi seluruh penerimaan pendapatan daerah yang terdiri dari Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 33.19 % dan Dana Perimbangan sebesar 66.81 %.

URAIAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	% REALISASI	% TERHADAP PENDAPATAN
PENDAPATAN	2.487.065.640.565,87	2.565.163.435.299,35	103,14%	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	789.629.819.565,87	851.377.438.761,35	107,82%	33,19%
DANA PERIMBANGAN	1.685.118.643.150,00	1.701.468.818.688,00	100,97%	66,33%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.317.177.850,00	12.317.177.850,00	100,00%	0,48%

TABEL II.2 REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022 telah menyelaraskan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis 2014-2019 yaitu :

1. Penerimaan pajak negara yang optimal ;
2. Terjaganya defisit anggaran ;
3. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal.

Permasalahan penting yang telah diidentifikasi pada Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya capaian Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (> 1 trilyun atau 33.19 % dari total pendapatan);
2. Belum maksimalnya Pelayanan kepada masyarakat (capaian 84.03, kategori Baik menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017)

dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017, maka pada tahun 2019 telah menyelaraskan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

1. Kurang optimalnya kualitas pelayanan public;
2. Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah melalui PAD;
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;
4. Belum maksimalnya sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dengan dokumen perencanaan pembangunan;
5. Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 telah ditetapkan sasaran strategis/Indikator kinerja Utama yang akan didukung oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi awal RPJMD	Taget 2020	Kondisi Akhir RPJMD
----	---------	-------------------	-----------------------	---------------	------------------------

1	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah	5.2	5.70	5.80
2	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP
3	Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	NA	83	90

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 telah ditetapkan Program Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari beberapa program pembangunan prioritas yang direncanakan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat beberapa program yang berbeda pendanaan indikatifnya dan belum memasukkan indikator kinerja yang ingin dicapai, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mereview Program Prioritas Daerah tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

Tabel T-C.31.

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah		Prosentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah		2.506.533.250	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Provinsi Kep Bangka Belitung	Prosentase Pertumbuhan pendapatan pajak daerah	4.78%	5.544.266.000,00	Penyesuaian Perubahan Cascading
								Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	79,00		Penyesuaian Perubahan Cascading
								Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik jasa lainnya pada Badan Keuangan Daerah	81.00		Penyesuaian Perubahan Cascading
2	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain Lain Yang Sah		Prosentase Kontribusi Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain-Lain Terhadap Pendapatan Asli Daerah		1.511.430.825,00	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain Lain Yang Sah	Provinsi Kep Bangka Belitung	Prosentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan LLPADS	5.03 %	124.399.250,00	Penyesuaian Perubahan Cascading
3	Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi Dan Perbendaharaan		Prosentase Bendahara Perangkat Daerah Yang Berkompeten		753.793.700	Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi Dan Perbendaharaan	Provinsi Kep Bangka Belitung	prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	100.00%	139.628.000,00	Penyesuaian Perubahan Cascading

4	Program Peningkatan Pelayanan Akutansi Dan Pelaporan		Persentase Laporan Keuangan PD Yang Sesuai Dengan SAP		1.520.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Akutansi Dan Pelaporan	Provinsi Kep Bangka Belitung	persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP	100,00%	317.128.000,00	Penyesuaian Perubahan Cascading
5	Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah		Nilai Aset Daerah Yang Dapat Diyakini Kewajarannya		2.509.318.850	Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	Provinsi Kep Bangka Belitung	persentase laporan BMD PD yang sesuai dengan Peraturan	100.00 %	441.684.000,00	Penyesuaian Perubahan Cascading
			Peningkatan Persentase Kontribusi Kemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD		396.580.000			persentase nilai asset yang dimanfaatkan terhadap seluruh nilai asset daerah	0.28 %		Penyesuaian Perubahan Cascading
6	Program Penganggaran Pembangunan Daerah		Tingkat Kesesuaian Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan Dan Jadwal Penetapan Apbd Dan Perubahan Apbd (Ket: 3 = Sesuai, 2 = Kurang Sesuai, 1 = Tidak Sesuai)		2.550.000.000	Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Provinsi Kep Bangka Belitung	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi	100.00 %	1.057.725.000,00	Penyesuaian Perubahan Cascading
			Prosentase Kesesuaian Antara RAPBD Dengan Dokumen KUA-PPAS		2.310.192.500			Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten/Kota	100.00 %		Penyesuaian Perubahan Cascading

2.4. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Terkait dengan usulan masyarakat terhadap Program dan Kegiatan yang disusun oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diakomodir melalui kuisisioner yang diisi oleh masyarakat pada pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota.

Masukan masyarakat akan diformulasikan pada kegiatan prioritas yang diusulkan dalam Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Tabel berikut merupakan formulasi usulan/masyarakat terhadap pelayanan oleh UPT Badan Kepulauan Bangka Belitung :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	7 Kabupaten /Kota	Peningkatan Pelayanan pada Loker khusus untuk pengesahan STNK 1 tahun, pada seluruh UPT Kabupaten/Kota diusulkan melalui masukan pada pengisian kuisisioner pengukuran IKM
1	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	2 Kabupaten /Kota	Peningkatan Pelayanan Samsat Definitif pada UPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai penutup kabinet kerja sehingga tema dan prioritas nasional RKP Tahun 2019 lebih terfokus. Prioritas nasional di bidang ekonomi masuk dalam Prioritas Nasional 3, yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

2.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Sehubungan telah diubahnya beberapa indikator dalam Rancangan Perubahan Renstra Badan keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka terdapat beberapa perubahan yang ingin dilakukan dalam Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan indikator tujuan yang ingin dicapai adalah Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator tujuan yang ingin dicapai adalah Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator tujuan yang ingin dicapai adalah Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dengan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD;
2. Meningkatkan kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD dengan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah prosentase kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD;
3. Meningkatkan kualitas Penata usahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan dengan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah Prosentase Penata usahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan

4. Meningkatkan kewajaran nilai asset daerah yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya;
5. Meningkatkan ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah dengan indikator sasaran yang ingin dicapai adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah.

Tabel dibawah ini merupakan ringkasan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam masa 2017-2022 :

TABEL 3.1

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH / INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

NO	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	32,08%	Meningkatkan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	87,32%
2.				Meningkatkan kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD	prosentase kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD	12,68%
3.	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Meningkatkan kualitas Penata usahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	Prosentase Penata usahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan	100,00 %
4.				Meningkatkan kewajaran nilai aset daerah yang disajikan dalam Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya	4.929.403.053.587,66
5.				Meningkatkan ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100,00 %
6.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan yang diberikan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	78,00	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah	80,25

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 telah ditetapkan Visi Pembangunan dalam RPJMD yang mendukung Visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih, Yaitu : ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***

Dalam Rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, yang juga telah ditetapkan 5 (lima) misi RPJMD priode yaitu :

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;
3. Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Peningkatan kesehatan masyarakat
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai instansi yang membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam kebijakan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung Misi 1 dan Misi 5 RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

Misi 1 : “Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah

Adapun salah satu tujuan tujuan yang ingin dicapai dari Misi 1 ini adalah meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat, dengan indikator tujuan Pengeluaran pemerintah perkapita.

Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat dengan indikator Persentase pertumbuhan kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB.

Misi 5 “ Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi”

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Misi 5 ini adalah :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas, dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Terwujudnya Pembangunan pembangunan demokrasi, dengan indikator tujuan yaitu Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas
4. Peningkatan Kebebasan sipil masyarakat
5. Peningkatan hak-hak politik masyarakat
6. Peningkatan peran lembaga demokrasi

Adapun target yang ingin dicapai oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 telah diuraikan pada Bab II.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan Urusan Penunjang Program Pemerintah Dalam Bidang Keuangan akan melaksanakan 1 (satu) Program non urusan yaitu Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah yang akan mengakomodir 6 (enam) kegiatan dengan total pendanaan sebesar Rp. 17.952.638.519,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah) dan 6 (enam) Program Pembangunan Prioritas yang akan mengakomodir 52 (lima puluh dua) kegiatan yang membutuhkan dana sebesar Rp. 20.251.902.375,00 (Dua puluh milyar dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) . Total Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebesar Rp. 38.204.540.894,00 (Tiga puluh delapan milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Tabel berikut memberikan gambaran Rumusan Program dan Kegiatan Badan keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0				Non Urusan								
0	0			-								
0	0	8		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (AA=90-100, A=80-90, BB=70-80, B=60-70, CC=50-60, C=40-50); Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	74,00; 100 %	12.749.698.157,00			4 nilai;100 %	
0	0	8	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD	Persentase Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	9.873.626.807,00	-		100%	12.724.369.518

0	0	8	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	3 dokumen	1.725.000,00	-		3 dokumen	49.600.000
0	0	8	4	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	SKPD	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya setelah mengikuti Bimtek/Diklat	28 orang	168.391.000,00	-		30 orang	330.750.000
0	0	8	5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	2.687.654.550,00	-		100%	5.160.462.808
0	0	8	6	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 laporan	3.300.800,00	-		7 laporan	49.600.000
0	0	8	8	Pengelolaan Kehumasan pada Bakuda	Provinsi	Jumlah bulan layanan Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA	12 bulan	15.000.000,00	-		12 bulan	153.300.000
4												
4	34			Keuangan								

4	34	15		Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah		<p>Prosentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah;</p> <p>Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah ;</p> <p>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik jasa lainnya pada Badan Keuangan Daerah</p>	<p>4,78%</p> <p>79.5</p> <p>81.00</p>	5.544.266.000,00			24,62 %;3 NILAI	
4	34	15	1	Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	Luar Daerah, Provinsi	Tercapainya realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah melalui PKB, BBNKB, PAP, PBBKB dan Pajak Rokok	673.279.876.467 Rp	568.544.000,00	-		740.607.864.113 Rp	832.305.125
4	34	15	2	Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	SKPD	Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	12 Bulan	280.525.000,00	-		12 Bulan	855.040.650
4	34	15	3	Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling (PPRG)	Provinsi	Jumlah Bulan Layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	12 Bulan	190.110.000,00	-		12 Bulan	628.893.618

4	34	15	4	Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	Pangkal Pinang	Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	12 Bulan	38.000.000,00	-		12 Bulan	102.089.231
4	34	15	5	Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	Provinsi	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	2 kali	17.800.000,00	-		2 kali	125.034.881
4	34	15	6	Penyusunan Pedoman tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	Luar Daerah, Provinsi	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang disusun	0	0	-		0	0
4	34	15	7	Sosialisasi Pajak Daerah	Provinsi	jumlah peserta Sosialisasi Perda Pajak Daerah jumlah hari pameran yang diikuti Jumlah spot sosialisasi pada media massa cetak dan elektronik	280 orang 7 hari 30 kali	187.813.250,00	-		280 orang 14 hari 30 kali	693.375.000
4	34	15	9	Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	Pangkal Pinang	Jumlah bulan layanan Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	12 bulan	710.774.000,00	-		12 bulan	1.100.000.000

4	34	15	10	Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka	Bangka	Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka	12 bulan	706.489.750,00	-		12 bulan	986.591.613
4	34	15	11	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung	Belitung	Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung	12 bulan	784.830.000,00	-		12 bulan	1.017.000.000
4	34	15	12	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah	Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	12 bulan	442.321.000,00	-		12 bulan	603.531.000
4	34	15	13	Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat	Pangkal PinangJumlah bulan layanan Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat	12 bulan	490.490.000,00	-		12 bulan	600.000.000
4	34	15	14	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan	Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan	12 bulan	541.425.000,00	-		12 bulan	682.137.500

4	34	15	15	Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur	Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur	12 bulan	585.144.000,00	-		12 bulan	853.012.500
4	34	15	24	Penyusunan regulasi/kebijakan bidang tata kelola pajak daerah	Pangkalpinang, SKPD	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang disusun	3 Pergub	0				
4	34	16		Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah		Prosentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah dan LLPADS	5.03 %	124.399.250,00			75,38 %	
4	34	16	1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Provinsi	jumlah Perangkat Daerah dan pihak terkait penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain	45 instansi	19.570.000,00	-		45 instansi	484.939.590
4	34	16	2	Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Provinsi	Jumlah penyelenggaraan Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	10 kali	35.729.000,00	-		12 kali	69.610.448
4	34	16	3	Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Provinsi	Jumlah penyelenggaraan Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	1 kali	27.499.000,00	-		1 kali	205.700.000

4	34	16	5	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	SKPD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	0	0	-		0 PERDA	0
4	34	16	7	Pembelajaran pengelolaan dan peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ke daerah lain	Luar Daerah	Jumlah kunjungan dalam rangka Pelaksanaan Pembelajaran pengelolaan dan peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain ke daerah lain	0 kali	0	-		0 kali	0
4	34	16	8	Tim pengawasan peningkatan pendapatan daerah	Provinsi	Laporan hasil pengawasan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 Laporan	32.576.250,00	-		3.221.562.958.146,77 Rp	600.000.000
4	34	16	10	Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang Sah	Pangkalpinang	Jumlah Peraturan Tentang Regulasi/Kebijakan Bidang tata Kelola retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah	1 peraturan	9.025.000,00				
4	34	18		Program Penganggaran Pembangunan Daerah		Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi; Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten/Kota	100 % 100 %	1.057.725.000,00			3 nilai;100 %	

4	34	18	1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	4 rancangan peraturan	270.000.000,00	-		4 rancangan peraturan	1.783.558.150
4	34	18	3	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD (PPRG)	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	200 orang	157.500.000,00	-		200 orang	400.000.000
4	34	18	6	Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	14 keputusan	48.250.000,00	-		7 keputusan	425.000.000
4	34	18	7	Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD	0	0	-		7 keputusan	400.000.000
4	34	18	8	Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Provinsi	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8 kali	23.200.000,00	-		8 kali	300.000.000
4	34	18	9	Penyusunan pedoman tentang penyusunan RKA-PD/PPKD	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Rapergub tentang pedoman penyusunan RKA-PD/PPKD	1 rancangan peraturan	0	-		1 rancangan peraturan	400.000.000
4	34	18	10	Penyusunan Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	1 rancangan peraturan	176.925.000,00	-		0 rancangan peraturan	0

4	34	18	12	Peningkatan fungsi pelayanan aplikasi SIMDA	Provinsi	terlaksananya asistensi aplikasi SIMDA	0	0	-		3 modul	315.000.000
4	34	18	12	Penyusunan KUA dan PPAS	SKPD	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan	4 DOKUMEN	287.900.000,00	-		4 DOKUMEN	757.653.600
4	34	18	15	Penyusunan regulasi/kebijakan bidang anggaran	SKPD, Pangkalpinang	Jumlah Peraturan Tentang regulasi / kebijakan bidang anggaran	1 peraturan	93.950.000,00				
4	34	19		Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan		Prosentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	317.128.000,00			100%	
4	34	19	1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 rancangan peraturan	121.568.000,00	-		1 rancangan peraturan	390.000.000
4	34	19	2	Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah bulan layanan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	12 bulan layanan	70.285.000,00	-		12 bulan layanan	690.000.000
4	34	19	3	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 laporan	72.100.000,00	-		1 laporan	140.000.000

4	34	19	5	Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	7 keputusan	19.525.000,00	-		7 keputusan	160.000.000
4	34	19	6	Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Nota Kesepakatan antara Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyusunan Laporan Keuangan	1 dokumen	33.650.000,00	-		1 dokumen	240.000.000
4	34	20		Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah		persentase laporan BMD PD yang sesuai dengan Peraturan; persentase nilai asset yang dimanfaatkan terhadap seluruh nilai asset daerah	100 % 0.27 %	441.684.000,00			5.244.499.204.715,99 Rp;0,36 %	

4	34	20	1	Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100 orang	71.540.000,00	-		100 orang	264.000.000
4	34	20	2	Penyusunan pedoman tentang pengelolaan barang milik daerah	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah pergub tentang pengelolaan barang milik daerah	0	0	-		1 peraturan	222.000.000
4	34	20	3	Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PPRG)	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	-		100 orang	144.000.000
4	34	20	4	Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	-		25 orang	265.000.000
4	34	20	5	Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	2 laporan	2.204.000,00	-		2 laporan	225.850.735

4	34	20	6	Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 keputusan	24.500.000,00	-		1 keputusan	275.000.000
4	34	20	7	Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Keputusan Gubernur tentang penetapan penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 keputusan	113.720.000,00	-		1 keputusan	135.000.000
4	34	20	8	Penyusunan laporan barang milik daerah	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 laporan	19.310.000,00	-		2 laporan	190.000.000
4	34	20	9	Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah	Provinsi	Jumlah Sertifikat lahan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20 sertifikat bidang tanah	49.210.000,00	-		20 sertifikat bidang tanah	350.000.000
4	34	20	10	Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan		Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan dan Pemeliharaan	1 keputusan	4.750.000,00	-		1 keputusan	80.000.000
4	34	20	11	Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	SKPD, Pangkal Pinang	Tersedianya dan beroperasinya aplikasi sistem SIMDA ter-update	12 bulan	29.700.000,00	-		1 laporan	480.000.000

4	34	20	12	Forum Komunikasi Manajemen Asset Daerah	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Dokumen data permasalahan dan pemecahan masalah asset di tingkat Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0		-		1 dokumen	140.000.000
4	34	20	13	Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Penilaian Asset yang sebelumnya bernilai Rp.0,00/Rp 1,00 dan Asset yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga	1 dokumen	126.750.000,00	-		1 dokumen	287.738.000
4	34	21		Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi		prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	100%	139.628.000,00			100%	
4	34	21	1	Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD (PPRG)	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah peserta Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	120 orang	65.174.000,00	-		120 orang	369.076.620
4	34	21	3	Sosialisasi Penata usahaan Keuangan	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah Peserta sosialisasi	100 orang	60.054.000,00	-		100 orang	145.200.000
4	34	21	4	Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	SKPD, Pangkal Pinang	Jumlah dokumen register SP2D, Buku Kas Umum B.IX BUD, Laporan posisi kas harian dan laporan posisi kas bulanan	4 dokumen	14.400.000,00	-		4 dokumen	169.400.000

4	34	21	5	Peningkatan fungsi pelayanan dan pemeliharaan sistem penggajian ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Jumlah bulan layanan Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung	12 bulan	0	-		12 bulan	145.496.450
					TOTAL			20.374.528.407				39.301.568.649

4.2 Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender

Memenuhi amanat Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentangPengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat dokumen Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019.

Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud adalah sebagai kewajiban daerah untuk memenuhi target dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan RKA-PD, .

Adapun target dalam PPRG Tahun Anggaran 2019 yang ingin dicapai :

N O	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA PPRG	PAGU
	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah (AA=90-100, A=80-90, BB=70-80, B=60-70, CC=50-60, C=40-50); Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	74,00; 100 %		
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya setelah mengikuti Bimtek/Diklat	28 orang	Meningkatkan partisipasi peserta perempuan terhadap peserta laki-laki menjadi 45 % : 55 %	168.391.000,00
A	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase Pertumbuhan pendapatan pajak daerah; Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah ; Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik jasa lainnya pada Badan Keuangan Daerah	4,78% 79.5 81.00		
1	Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling (PPRG)	Jumlah Bulan Layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling	12 Bulan	Peningkatan Intensitas kunjungan layanan Samsat Keliling pada daerah potensial menjadi sebesar 11.00	190.110.000,00
B	Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi	100		
		Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Kabupaten/Kota	100		
1	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD (PPRG)	Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	200 orang	Meningkatkan partisipasi peserta perempuan terhadap peserta laki-laki menjadi 45 % : 55 %	157.500.000,00
C	Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi	prosentase kesesuaian waktu pelayanan terhadap pencairan dana keuangan	100		
1	Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD (PPRG)	Jumlah peserta Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	120 orang	Meningkatkan partisipasi peserta perempuan terhadap peserta laki-laki menjadi 50 % : 50 %	65.174.000,00

BAB IV

PENUTUP

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan ditetapkan dalam program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini.

Untuk melaksanakan Rencana Kerja ini prinsip efektif, efisiensi, akuntabel, transparan akan diutamakan sesuai dengan pagu indikatif yang tersedia. Apabila pagu indikatif yang tersedia tidak cukup untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini, maka akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku pelaksana kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Pangkalpinang, September 2018

KEPALA BADAN,

FERY AFRIYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19700409 199603 1 004